

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN LURAH DALAM MEMBINA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA
(RW) DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUHAMMAD RIDHWAN HASDAR
137310312

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT akhirnya saya diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat mendapatkan gelar sarjana pada program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau. Dengan segala kekurangan yang ada tentunya akan saya buktikan kepada orang-orang yang telah mempercayai saya menjadi sarjana ini untuk berbuat terbaik di tengah masyarakat, dengan tetap mengedepankan rasa rendah hati dan semangat kuat untuk bisa meraih cita-cita.

Buat Ayahku H. Hasyim Basri, S.IP dan Ibuku Hj. Darwani, S.Pdi sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang bisa menyamakan dalam pengorbananmu, sayangmu tak terbatas dari waktu ke-waktu, dari ujung ke-ujung tak pernah ku temui kebencian di hatimu, tiada yang lebih indah dari kasih sayangmu, selama aku menuntut ilmu doa dan perhatianmu tak sedetik terhenti oleh ruang dan waktu agar aku berhasil dalam cita-citaku, tak lupa pula kepada dua adekku yang ku cintai, Al Hafidh Hasdar dan Nabilla Putri Hasdar, yang selalu mendukungku dalam perkuliahanku terimakasih dek atas doanya, saudaraku keluargaku yang selalu memberi semangat motivasi serta material dan moril untuk menyelesaikan studiku semoga Allah membalas kebaikan yang telah membantu dalam penyelesaiannya studiku ini Amin.

Sahabat-sahabatku seperjuangan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau Khususnya Program studi Ilmu Pemerintahan dan semua teman-teman terimakasih pada kalian semua, kalian selalu memberi semangat dukungandan canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. terima kasih buat kalian semua.

Terima kasih Dosenku yang juga banyak andil dalam penyelesaian studiku dengan memberi semangat Motivasi maupun Nasehat yang tak bosan-bosannya sampai studiku selesai, khusus Dosen ku, Bapak, Dr. .H. Panca Setyo Prihatin, S.IP,M.Si, sebagai Wakil Dekan. I sekaligus Dosen Pembimbing dan PA ku, dan Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si, Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan, Bapak Andriyus, S.Sos,M.Si sebagai sekretaris prodi IP, Bapak Dr.

Zainal, S.Sos.,M.Si yang telah memotivasi saya untuk tetap yakin dan percaya diri dan memberikan masukan dan nasehat, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu..semoga sehat dan sukses selalu amin.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala puji dan syukur penuli ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga akhirnya skripsi dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “Peranan Lurah Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu, secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkann salud dan ribuan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Dr. H.Moris Adidi Yogia, M.Si. Yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Islam Riau dan jajaran dosen program studi ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak .Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP. M.Si, selaku pembimbing saya, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dari penyusunan skripsi sampai selesainya skripsi ini
5. Seluruh Staff/pegawai pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan adminitrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
6. Kepada Bapak/Ibu/segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi.
7. Pemerintah kecamatan kota Pekanbaru atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

8. Persembahkan ini diberikan terutama untuk kedua orang tua, Ibuku Hj. DARWANI,S. Pdi. dan Ayahku H. HASYIM BASRI. S. IP. Yang telah bekerja keras, berdoa dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dari apapun.
9. Terimakasih kepada senior senior dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanallah Wata'ala.
10. Mahasiswa/i Program studi ilmu pemerintahan angkatan 2013 yang telah mendukung dalam kebersamaan yang penuh keceriaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di penulis menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpahdari Allah SWT, amin Ya Rabbal alamin.Wassalam mualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini, semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada

Pekanbaru, 2019

Penulis

MUHAMMAD RIDHWAN HASDAR

1 3 7 3 1 0 3 1 2

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pemerintahan.....	12
2. Pemerintahan Daerah.....	14
3. Fungsi Pemerintah Daerah.....	15
4. Konsep Kelurahan.....	18
5. Konsep Pembinaan.....	20
6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.....	24
7. Fungsi Kelembagaan.....	29
8. Manajemen Pemerintahan.....	33
9. Pelayanan Publik.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pikir.....	40

C. Konsep Operasional.....	41
D. Operasional Variabel.....	42
E. Teknik Pengukuran.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi	32
1. Populasi	45
2. Sampel.....	46
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis Dan sumber Data	47
1. Data Primer.....	47
2. Data Skunder	47
F. Teknik Pegumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
1. Jenis Data	49
2. Jenis Teori	49
3. Proses Analisis	49
H. Jadwal Penelitian.....	49

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Demografi.....	51
1. Penduduk dan Perkembangannya.....	51
A Struktur Umur Penduduk.....	52
B. Batas Wilayah	52
2. Penduduk	52
3. Mata pencarian	53
4. Pendidikan	54
5. Karang Taruna.....	54
6 .Sarana kesehatan	56
B. Uraian Tugas Lurah dan Fungsi Lurah.....	56

1. Tugas lurah.....	56
2. Fungsi lurah.....	57
3. Sekertaris lurah.....	57
4. Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan.....	58
C. Kepala Subbagian Umum dan perlengkapan	58
D. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	59
E. Kasi Tata Pemerintahan.....	60
F. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	61
G. Kasi Keamanan Ketertiban.....	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	63
B. Hasil Penelitian.....	65
C. Hambatan – Hambatan	78

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

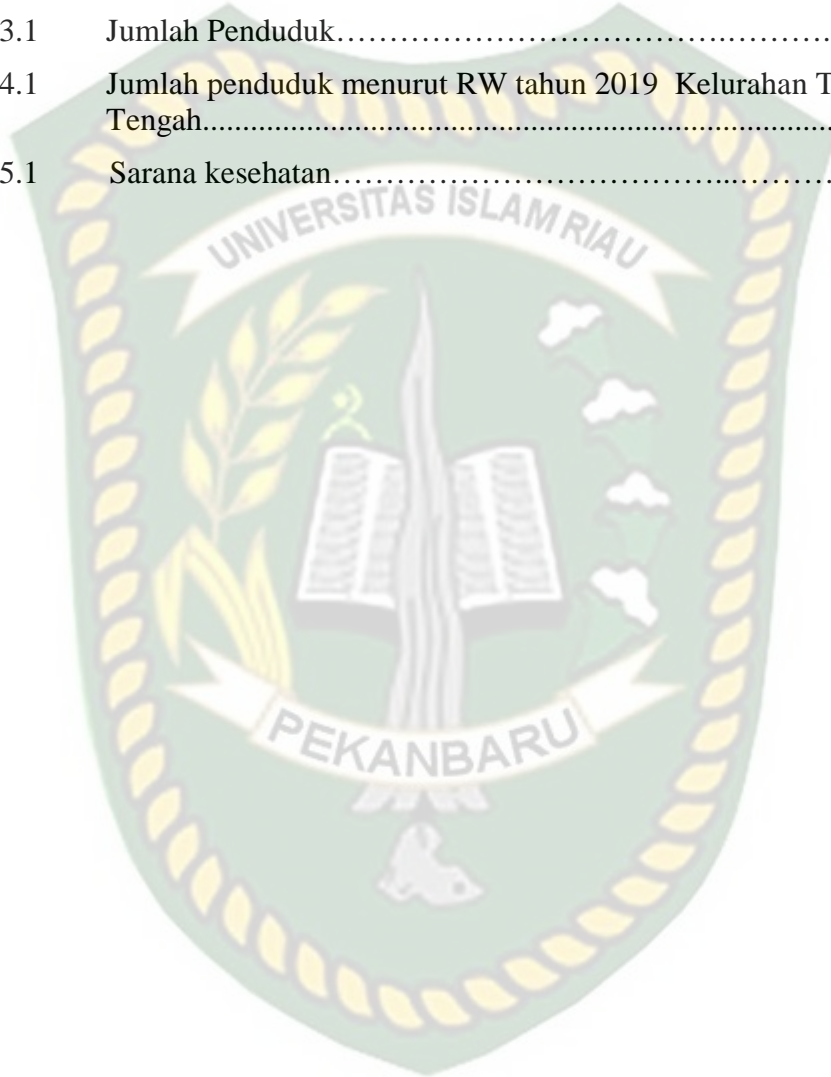
DAFTAR PERPUSTAKAAN	82
---------------------------	----

DOKUMENTASI	84
-------------------	----

LAMPIRAN	
----------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah populasi dan sampel penelitian tentang peranan kepala kelurahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di lurahan tangkerang tengah marpoyan damaikota pekanbaru
Tabel 2.1	Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di kecamatan marpoyan damai Tahun 2019.....
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk.....
Tabel 4.1	Jumlah penduduk menurut RW tahun 2019 Kelurahan Tangkerang Tengah.....
Tabel 5.1	Sarana kesehatan.....



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar kuisisioner penelitian lampiran 1.....74
2. Daftar kuisisioner penelitian lampiran 2.....”.....79
3. Daftar kuisisioner penelitian lampiran 3.....81
4. Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Terkait Dengan Judul Penelitian Peranan Lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan RT / RW di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota Pekanbaru
5. Surat rekomendasi penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terkait dengan judul penelitian tentang peranan lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan RT / RW di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru
6. Surat rekomendasi penelitian dari kesbangpol kabupaten kota pekanbaru terkait judul penelitian tentang peranan lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan RT / RW di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru
7. Surat balasan dari kantor camat marpoyan damai terkait dengan penelitian yang berjudul peranan lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan rt/rw di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Muhammad Ridhwan Hasdar
NPM : 1 3 7 3 1 0 3 1 2
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Lurah Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Di Kelurahan Tangkerang Tengah Marpoyan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri.
2. Tidak karya plagiat yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
3. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
4. Bahwa, apa bila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru..... 2019

Muhammad Ridhwan Hasdar
1 3 7 3 1 0 3 1 2

**PERANAN LURAH DALAM MEMBINA LEMBAGA KEMASYARATAN
RT/RW KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN
.MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh
MUHAMMAD RIDHWAN HASDAR

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana peran kepala lurah dalam kemasyarakatan di lurah tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah survey deskriptif dengan menggunakan Metode kualitatif

Penelitian ini dilakukan di lurah tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya peran kepala lurah dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di lurah tangkerang tengah kec.marpoyan damai kota pekanbaru berkategori baik hal ini terlihat dari 54 orang atau sebesar 60% menyatakan bahwa secara keluruhan indikator peran kepala lurah tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai sudah cukup baik karena berada persentase 40-70% adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam peran kepala lurah tangkerang tengggah kecamatan marpoyan damai : kurangnya biaya dari APBD dan belum mendapatkan dibuktikan dengan masyarakat RT/RW dominan tidak hadir ketika diundang mengadakan rembuk lurah atau acara, kecamatan lain.

Kata kunci : Peranan, Lembaga Kemasyarakatan, Kemasyarakatan.

**THE ROLE OF LURAH IN FOSTERING RT / RW KEL SOCIAL
INSTITUTIONS TANGKERANG TENGGAH KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI KOTA PEKANBARU
ABSTRACT**

**by
MUHAMMAD RIDHWAN HASDAR**

This study aims to see and to what extent the role of the head of the lurah in community in the village of Tangkerang, Tenggara sub-district, Marpoyan Peace, Pekanbaru, is in accordance with the problem. The type of research is descriptive survey using qualitative methods.

This research was conducted in the village of Tangkerang Tengah, the sub-district of the peaceful Marpoyan, Pekanbaru. The reason the researchers took the location of this study was based on the phenomenon that the role of the head of the lurah in organizing social institutions in Tangkerang sub-district fell to the peace maritime city of Pekanbaru in good category. It was seen from 54 people or 60%. peaceful marpoyan sub-district is already quite good because it is in the percentage of 40-70% as for the obstacles found in the head role of lurah Tangkerang, the sub-district of peaceful Marpoyan: the lack of funds from the regional budget and not yet proven by the dominant RT / RW community when invited to hold a lurah consultation or event, another sub-district.

Keywords: Role, Village Head, Social Affairs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia diberbagai daerah. Pemerintahan sebagai aparatur negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan dibagi ke daerah-daerah kabupaten/kota yang tiap propinsi, kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pada pasal 10 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi :

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Sementara itu adapun urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian;
- h. Transmigrasi.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Kecamatan dibentuk dalam Pasal 221, sementara kelurahan dibentuk dan diatur dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (2) dikatakan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (3) lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekda dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (4) lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melakukan pembedayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- g. Peraturan perundang-undangan.

Kelurahan sebagai satuan administrasi pemerintahan terendah yang berkedudukan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dengan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kedudukan dan tugas lurah Pasal (3) Nomor 73 Tahun 2005. Dalam Pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan kelurahan ditegaskan bahwa fungsi Lurah adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- b. Melaksanakan pembangunan
- c. Melaksanakan lembaga kemasyarakatan

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan disebutkan tugas lurah adaah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pada BAB IV susunan organisasi pasal 6 :

- a. Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
- b. Perangkat kelurahan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya (4) empat seksi serta jabatan fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada lurah.
- d. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disi dari pegawai negeri sipil yang diangkaqt oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat
- e. Ketetntuan lebih lajut mengenai struktur organiassi dan tata kerja keurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi fungsi Lurah adalah “Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan”. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna pos pelayanan terpadu, pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pada pasal 4 Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa

1. LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok yang dijelaskan pada. Pasal 5 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Peranan lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan, merupakan, ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui tuntutan dan anjuran kepada, masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Keberadaan rukun tetangga (RT) dan, rukun warga (RW) berperan yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. peran penting rukun tetangga (RT) dan rukun,Warga (RW) dapat dirasakan ketika kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan, oleh satuan kerja perangkat, daerah (SKPD) berkat partisipasi warga, masyarakat melalui kerjasama dengan perangkat, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). rukun tetangga, (RT) dan rukun warga (RW) merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan berperan. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang penataan lembaga, ketahanan masyarakat lurah atau kata lain rukun tetangga disingkat RT lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan. sedangkan rukun warga disingkat RW terbentuknya lembaga ini melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan, lembaga ini sangat dibutuhkan pembinaan kepada instansi yang

paling terdekat dengan masyarakat tujuannya untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan bisa berjalan dengan baik.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Kecamatan Marpoyan Damai adalah salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai termasuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 29,74 km dimana wilayahnya terbagi atas 5 kelurahan yaitu, Kelurahan Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, Maharatu, Sidomulyo Timur, Wonorejo.

Dalam realitas di lapangan, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) memiliki banyak tugas dan fungsi tugas utama rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) antara lain membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. begitu juga dengan keberadaan RT dan RW di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil observasi, yang penulis

peroleh, ditemukan beberapa fenomena kurangnya pembinaan Lurah tangkerang kecamatan marpoyan damai Kota Pekanbaru yang terjadi terhadap RT dan RW, yaitu :

1. Dalam tugas pengadministrasian, RT dan RW diberi tugas untuk mencatat dan melaporkan jumlah penduduk yang masuk dan keluar dalam wilayah mereka masing-masing, namun yang terjadi selama ini data kependudukan yang dilaporkan masing-masing RT dan RW asal-asalan dibuat, ini artinya menunjukkan kurang pengawasan Lurah terhadap tugas yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
2. Salah satu tugas RT/RW yang ditetapkan oleh Lurah adalah melaporkan data kependudukan pada pemerintah setiap bulannya, namun tetapi masih ada beberapa orang RT dan RW tidak memberikan laporannya kepada Lurah, ini terjadi karena Lurah tidak mengevaluasi laporan yang diterima.
3. Kurangnya perhatian lurah terhadap rukun tetangga dan rukun warga untuk menggerakkan gotong-royong, membuat menurunnya partisipasi masyarakat, sehingga kebersihan dan keindahan dilingkungan tidak terjaga lagi.
4. Tidak diaktifkannya pos ronda di beberapa daerah rukun warga (RW) ataupun rukun tetangga (RT) sehingga keamanan dan ketertiban sudah berkurang dalam lingkungan masyarakat.
5. Berkurangnya pembinaan yang dilakukan rukun warga dan rukun tetangga terhadap pemuda yang ada ditempatnya sehingga kreatifitas

pemuda tidak ada, apalagi dalam membuat acara-acara perayaan 17 Agustus.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: ” *Peranan Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*”.

B. Rumusan masalah

Dari uraian dan gambaran masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Apakah sajakah faktor penghambat dari Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peranan Lurah dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan RT / RW Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah dalam memelihara aman dan ketertiban Di Kantor Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis yaitu sebagai bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kelurahan Kota Pekanbaru dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafii (2001;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintahan pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Dari beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya "Government" dan Prancis menyebutnya "Gouvernement". Dalam bahasa Arab "Hukumat", Di Amerika Serikat disebut "Administration". Sedangkan Belanda mengartikan "Regering" sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai pengusaha menetapkan

perintah-perintah (Ndraha,2010;4). Sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah (Ndraha, 2010;6).

Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2010;7).

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Lebih lanjut bahwa yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan,

(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha,2010;).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbebani oleh pemerintahan pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah (dalam Rosidin, 2010;39).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

2. Pemerintahan Daerah

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa pembagian wilayah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak usul-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, berubah perannya menjadi perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan kelurahan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa lurah menjadi perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Dalam hal ini camat dan lurah selaku perangkat kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan). Karena melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum penyelenggara negara yang di dalam hukum dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.

Fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah. Ada sejumlah alasan rasional tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa alasan yang menyebabkan

sehingga pemerintah daerah penting menurut Ni'matul Huda (2009: 95) sebagai berikut:

1. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi.
2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
3. Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional..Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
4. Keadilan. Desentralisasi/ otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

4. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayahkerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan di pimpin seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh

lurah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah di wilayah kelurahan. Adapun tugas lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan fungsi Lurah adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefinisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo, (2001;10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan.

Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana,2009: 105)

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

5. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha, (2007;8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (2015;52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai

adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso, (2015;60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Meburut kamus besar bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tau menjadi lebih tau. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikatornya adalah :

- a. Membuat program penyuluhan.
- b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
- c. Melaksanakan program yang telah diatur.
- d. Mengevaluasi program dari hasil tersebut.

2. Pengarahan

Menurut saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010:34) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang

pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun indikatornya adalah :

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa.
3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (2008:12) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkeseimbangan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Thoah, (2007;7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya

kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang, (2009;11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan-nya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

- a. Mengatur stretegi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- b. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan. 3
- c. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
- d. Memberi membenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahankesalahan

yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto Dalam Raharjo (2004;162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (Dalam Raharjo, 2004;162) pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Dari ketiga definisi diatas jelas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu system atau kompleks nilai dan norma. System nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut (Raharjo, 2004;162).

Selanjutnya Soekanto (2002;197) menjelaskan lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada menggunakan istilah “pranata social”, tetapi *social-institution* menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata social adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat

kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin terjemahan dari istilah *Soziale- Gebilde* (bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan suasana *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gillin (dalam Soekanto, 2002;2009) didalam karyanya yang berjudul *General features of social institution* adalah sebagai berikut :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyaraktan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-

norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan tugas lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan tugas sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, tugas social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin tugas tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi didalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila di dorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan tugas lembaga yang bersangkutan. Sebagai

contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.

6. Satu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut, Gillin (dalam Soekanto, 2002;211;212) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

1. *Crescive institution* dan *enacted institution* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institution* yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adatistiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. *Enacted institution* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistemisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh Negara.

2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atau *basic institution* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institution* yang pokok. Sebaliknya adalah *subsidiary institutiob* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai *basic* dan *subsidiary*, berbeda dimasing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman Romawi dan Yunani Kuno dianggap sebagai *basic institution*; pada dewasa ini kiranya tak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institution* dan *unsanctioned institution*. *Approved* atau *social sanctioned-institution* adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsanctioned institution* yang ditolak oleh masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencuri dan sebagainya.
4. Pembedaan antara *general institution* dengan *restrited institution*, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada factor penyebarannya.

Misalnya agama merupakan suatu *general institution*, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama islam, protestan, katolik, budha danlain-lainnya, merupakan *restricted institution*, oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.

5. Sudut fungsinya terdapat perbedaan *operative institution* dan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrilisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

7. Fungsi Kelembagaan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakasa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah. Lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta

memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan lurah.

RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. RT/RW mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkeseimbangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetia kawan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut G.R. Terry dalam buku *prinsiples of manajemen*, merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Permadi,2010;11).

Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Sunyoto 2012;3).

Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada sektor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu (dalam Ndraha, 2010: 268).

Adapun fungsi-fungsi manajemen Hendry Foyal (1916) (dalam Pasalong, 2013;4).

antara lain:

1. Planning (perencanaan);
2. Oraganizing (pengorganisasian);

3. Comannding (pengarahan);
4. Coordinating (koordinasi);
5. Controlling (pengawasan).

Stoner menjelaskan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok (dalam Pasolong, 2013;4).

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Permadi, 2010;12).

Teori kepemimpinan (Kartono, 2011;31-32) adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan.

Konsep kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pasolong, 2013;05).

Kemudian Kartono mengatakan kepemimpinan adalah “kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperati mencapai tujuan yang sudah direncanakan (dalam Pasolong, 2013;5). Kemudian fungsi kepemimpinan Nawawi, et.al (2004; 75-81) adalah:

1. Fungsi intruktif;
2. Fungsi konsultatif;

3. Fungsi partisipatif;
4. Fungsi delegasi; dan
5. Fungsi pengendalian.

Sedangkan pemimpin menurut Moekijat adalah:

- a. Seorang pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan/menjuruskan orang-orang lain.
- b. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- c. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut bertanggung jawab, kepada orang-orang bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinanya (dalam Permadi, 2010;10).

Menurut Hicks dan Gullet mengatakan pemimpin yang aktif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian birokrasi (dalam Pasolong, 2013;20).

Adapun tugas pemimpin menurut Stoner adalah:

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi;
2. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas), seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk

mencapai outcome yang terbaik, pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan staffnya tanpa kegagalan;

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas, dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staff, kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif;
4. Pemimpin harus berfikir secara analitis dan konseptual, seorang pemimpin harus menjadi seseorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat, pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain;
5. Manajer adalah seorang mediator, konflik salah satu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah);
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi, sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasi;
7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

Sedangkan menurut Kartono (2011;62) fungsi pemimpin adalah:

1. Memprakarsai struktur organisasi;

2. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi;
3. Merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana dan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan;
4. Mengenai pertentangan dan konflik-konflik yang muncul, dan mengadakan evaluasi;
5. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pembangunan dan penyempurnaan organisasi.

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi, oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial.

9. Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayan publik menurut Wasistiono (2001;51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Moenir (2003:82) terdapat beberapa factor pendukung pelayanan yang penting, yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.

- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat kerja yang tinggi.
- e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus pegawai.
- f. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersiapnya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatannya fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.

Pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya kerja sama antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani guna dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, (Pasolong,2008:128).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan. adapun penelitian terdahulu penelitian ini adalah sebagai berikut

Table II.1. Skripsi Terkait Terdahulu Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Persamaan dan Perbedaan

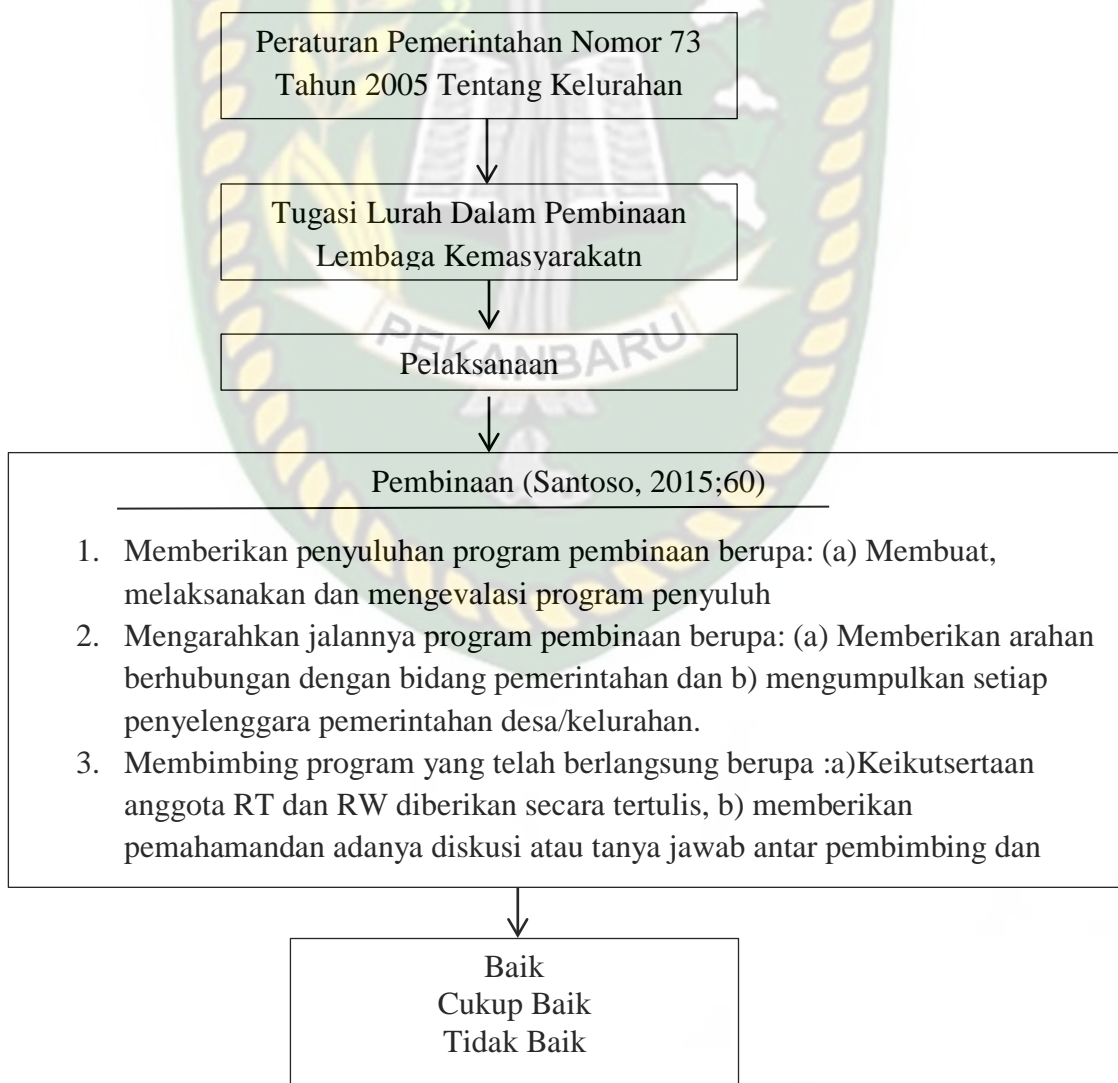
No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ichwann Hastona (2014)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014	Sama-sama meneliti fungsi lurah	Penelitian pertama membahas fungsi lurah terhadap RT dan RW sedangkan penelitian peneliti membahas fungsi Lurah terhadap Lembaga Kemasyarakatan
2	Roni Palsa (117311000) Tahun 2013	Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2016	Sama-sama meneliti variabel pembinaan	Penelitian kedua membahas fungsi pembinaan pemerintah kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan, sedangkan penelitian peneliti membahas fungsi lurah terhadap lembaga kemasyarakatan

Sumber: Modifikasi Penulis

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan lembaga sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

Gambar II.1. Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penerafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja lurah sebagai prangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
2. Lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.
3. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
4. Pembinaan lurah, yang dimaksud pembinaan adalah serangkaian kegiatan pembinaan berupa pembimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan serta pemberian penghargaan oleh lurah terhadap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.
5. Memberikan penyuluhan program pembinaan yaitu membuat, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluh
6. Mengarahkan jalannya program pembinaan yaitu memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan dan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan
7. Membimbing program yaitu memastikan keikutsertaan anggota RT dan RW diberikan secara tertulis, memberikan pemahaman dan adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1: Operasional Variabel tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Konsep Operasional	Variabel	Indikator	Dimensi	Kategori Ukuran
Pelaksanaan	Pembinaan	1. Penyuluhan	1. Membuat program penyuluhan. 2. Melaksanakan program yang telah dibuat. 3. Mengevaluasi program dari hasil	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		2. Pengarahan	1. Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan. 2. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		3. Bimbingan	1. Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis. 2. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. 3. Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	Baik Cukup Baik Tidak Baik

Sumber: Olahan Peneliti 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksana variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah baik, cukup baik, kurang baik.

Untuk melihat hasil pelaksanaan fungsi lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

- Baik : Apabila semua indikator Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 71-100%
- Cukup Baik : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup baik 34-70%
- Tidak Baik : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru hanya menjalankan satu indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori kurang baik 0-33%

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Baik : Apabila semua item penilaian mendapatkan tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Tidak Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

2. Pengarahan

Baik : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Tidak Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

3. Bimbingan

Baik : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Tidak Baik : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptis adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitan berupa kuisisioner yang dilakukan untuk mengetahui variabel. Adapun untuk jenis data analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa kantor lurah merupakan perangkat daerah yang cukup penting dan berperan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sehingga sesuai data dilapangan mengenai pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan dilapangan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang membedakannya adalah menurut Usman dan Akbar (2011:42) menyatakan: populasi populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun

pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Sedangkan Sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar 2011:43), yang menjadi Sempel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kelurahan, PKK dan Karang Taruna. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah Populasi dan Sampel yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 1:3 Jumlah populasi dan sampel penelitian tentang Peranan Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala lurah	1	1	100 %
2	Sekretaris lurah	1	1	100 %
3	Kelompok Jabatan Fungsional	1	1	100 %
4	Saksi Pemerintahan	1	1	100 %
5	Ketua pemuda	1	1	100 %
6	Ketua RT	4	4	100 %
7	Ketua RW	1	1	100 %
8	Masyarakat	-	10	-
Jumlah		20	20	100 %

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan Sampel yang digunakan ada dua teknik yaitu teknik sensus karena jumlah populasi aparatur pemerintah tergolong kecil yaitu 1 orang Lurah dan 1 orang Sekretaris Lurah, selanjutnya teknik purposive sampling yang mana teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu. Peneliti mengambil dan membatasi sampel dan Rukun Warga (RW) menjadi 1 orang dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 orang yang mana dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, masyarakat kelurahan diambil sebagai sampel secara purposive sebanyak 9 orang, sehingga jumlah keseluruhan sampel 20 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang Peranan Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Data skunder, adalah data yang telah tersedia, diperoleh dengan membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada kantor Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi menurut Supriyati (2011:46) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian, untuk mendapatkan informasi mengenai Kuesioner Peranan Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2008:199) Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. dalam hal ini kusioner adalah memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono (2008:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Suharsimi Arikanto (2011:201) adalah barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Survey Deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan di analisa dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kemudian di analisa selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Februari 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Peyusunan Up																				
2	Seminar up																				
3	Revisi up																				
4	Revisi Quisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				

6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil (Skiprisi)																												
9	Konsultasi Revisi Skiprisi																												
10	Ujian Konfrehensif																												
11	Revisi Skiprisi																												
12	Penggandaan Skiprisi																												

Sumber : *Data Olahan Penulis, 2019*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Demografi

1. Penduduk dan Perkembangannya

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran atau terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan diantara tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi yaitu : perpindahan penduduk dari suatu Negara lain atau Daerah. Demikian juga halnya dengan daerah Kecamatan Marpoyan Damai Perkembangan Penduduknya juga tidak lepas dari factor kelahiran dan migrasi.

a. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dapat dikaitkan dengan ketenaga kerjaan dan beban tanggungan hidup usia produktif. Selanjutnya untuk mengetahui struktur umur penduduk Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4:1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019

No	Kelurahan	Luas(km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Tangkerang Tengah	4,64	36.387	7.842
2	Tangkerang barat	5,35	19.632	3.670
3	Maharatu	11,26	33.840	3.005
4	Sidomulyo timur	7,19	28.392	3.949

5	Wonorejo	1,34	21.039	15.901
Jumlah		29.79	139.559	4.686

b. Batas Wilayah

Paling luas dari kelurahan lainnya, Pembagian luas wilayah tersebut antara lain :

- Kelurahan Tangkerang Tengah, luas areal : 96,08 Ha
- Kelurahan Tangkerang Barat, luas areal : 105,73 Ha
- Kelurahan Maharatu, luas areal : 266,63 Ha
- Kelurahan Sidomulyo Timur, luas areal : 169,08 Ha
- Kelurahan Wonorejo, luas areal : 32,90 Ha

2. Penduduk

Dibawah ini akan di paparkan jumlah penduduk yang ada dikecamatan marpoyan damai tahun 2019

Tabel 4:2 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	14482 Jiwa	50%
2	Perempuan	12.900 Jiwa	50%
Jumlah		14494 jiwa	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Tabel diatas hanya merupakan jumlah penduduk kelurahan Maharatu secara umum. Dimana dijelaskan jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk kelurahan maharatu 27.382

jiwa yang terdiri dari laki-laki 14.482 dan perempuan 12.900 jiwa. Kepadatan penduduk kelurahan maharatu berkisar 27 161 jiwa perhektar atau 7.566 jiwa perkilometer persegi komposisi umur berdasarkan umur dan jenis kelamin.

3. Mata pencarian

Adapun untuk mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada kecamatan Marpoyan damai terdiri dari kabupaten kota pekanbaru sebagai pegang, PNS, Buruh , TNI dan POLRI, Pedagang dan lain-lain. Maka dari itu mayoritas mata pencarian di kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru sebagai PNS. Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lurah dapat di lihat pada tamble dibawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut RW Tahun 2019 Kelurahan Tangkerang Tengah

No	RW	Jumlah KK
1	1	724
2	2	674
3	3	681
4	4	627
5	5	497
6	6	668
7	7	145
8	8	535
9	9	299
10	10	258
11	11	443
12	12	258

4. Pendidikan

Dilihat dari sudut pendidikan bahwa sirkulasi kehidupan manusia dan bentuknya tidak terlepas dari unsur pendidikan yang memiliki agar setiap kegiatan aktifitas yang diembannya dapat terlaksana dengan baik dengan kata lain, pendidikan memegang peranan yang penting dalam upaya pencapaian tujuan dari pelaksana aktifitas selama ini produktifitas masih di kehendaki, karena pendidikan mencakup konsep sebagai ilmu dan pengetahuan yang dapat mengantarkan kemajuan baik individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang di hadapi generasi muda, baik yang bersifat prenentif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggara usaha kesejahteraan social ;
- b) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah sertaberkemsinambungan ;
- d) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;

- e) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara kesatuan republik Indonesia ;
- g) Pemupuhan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mudah yang gunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h) Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k) Penyelenggara kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja dan lain-lain;
- l) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

6. Sarana kesehatan

Untuk mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat, dikecamatan marpoyan damai kota pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana kesehatan seperti : pukesmas, pustu (pukesmas pembantu), posyandu. Untuk lebih jelas dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 4.5 Sarana kesehatan

No	Sarana kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	4
2	Pustu (puskesmas membantu)	3
3	Posyandu	2
Jumlah		9

Sumber : Kantor Kelurahan Tangkerang Tengah

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa jumlah sarana kesetahatan yang ada di kecatamatan marpoyan damai kota pekanbaru yaitu pukesmas berjumlah 4. Pukesmas pembantu berjumlah 3. Posyandu berjumlah 2 adapun keseluruhan adalah 9. sarana kesehatan yang ada di kecatamatan marpoyan damai kota pekanbaru.

B. Uraian Tugas lurah dan fungsi lurah

1. Tugas lurah

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c) Memelihara pelayanan masyarakat;
- d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

- e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
- h) perundang-undangan.

2. Fungsi Lurah

- a) Penyusunan program dan kegiatan kelurahan;
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga;
- d) Pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang posyandu dan kebersihan;
- f) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
- g) Pelaksanaan penatausahaan kelurahan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Sekertaris lurah

- a) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengkoordinasikan kegiatan di kelurahan.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 73 tahun 2014.

4. Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan

- a) Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja serta anggaran kelurahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan mengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pegawai dilingkungan kelurahan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup kelurahan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala sub bagian umum keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas kesekretariatan kecamatan di bidang keuangan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas pokok, kepala subbagian keuangan dan perlengkapan melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan keuangan dan perlengkapan kecamatan marpoyan damai.
- b) pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran. Pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan.
- c) Pengelolaan perlengkapan kecamatan meliputi pengadaan barang untuk kebutuhan kecamatan untuk kelurahan, inventaris barang dan asset, administrasi asset, pemeliharaan asset.
- d) Penyusunan asset laporan kecamatan marpoyan damai.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala subbagian perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariat kecamatan di perencanaan dan pengendalian, fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kegiatan kecamatan.
- b) pengorganisasian penyusunan rencana dan program
- c) pengendalian program dan kegiatan kecamatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.
- d) penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan.

- e) monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

E. Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai Tugas lurah lingkup pemerintahan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical Kasi tata pemerintahan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a) Pengelolaan adminitrasi pemerintahan
- b) Penyusunan data dan bahan lingkup pemerintahan
- c) Pelayanan adminitrasi pertanahan lingkup kecamatan Marpoyan damai kelurahan tangkerang tenggah
- d) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan kota
- e) Monitoring dan evaluasi pelayanan adminitrasi pertanahan kelurahan dan kota
- f) Pembinaan dan pengawasan perangkat kelurahan dan kota
- g) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kota
- h) Monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kota
- i) Pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan dan pembinaan adminitrasi pemerintahan kelurahan dan kota
- j) Fasilitas, pemantauan dan Pembina pelaksanaan pilkada, Filpres, pemilu di kecamatan, kelurahan dan kota pekanbaru

- k) Pelaporan pelaksanaan lingkup kecamatan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan
- b) penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan
- c) dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program
- d) pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial
- e) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f) berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan.
- g) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawah.
- h) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, Petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan Sesuai dengan bidang dan tugas.
- i) Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar Efektif dan efisien sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- j) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas.
- k) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- l) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- m) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.

- n) Melakukan fasilitas pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, dan tuna sosial.
- o) Melakukan inventaris dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

G. Kasi Keamanan Dan Ketertiban

- a) Meningkatkan keadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram
- b) Mmenunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mandirikan pos-pos penjagaan /ronda,
- c) Memasang lampu-lampu penerangan ditempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dan lain - lain
- d) Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana
- e) Fasilitas dan pengoordinasian kegiatan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dengan instansi terkait.
- f) Pelaksana koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penerapan dan perangkat peraturan perundang-undangan
- g) Pembinaan, pengawasan dan fasilitas rapat lembaga masyarakat lurah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian berjumlah 20 orang dengan identitas sebagai berikut:

1. Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Disisi lain tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang dalam setiap melakukan aktivitas dalam kehidupannya, usia seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dalam bekerja. Adapun tingkat usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	≤ 20	-	-
2.	21 – 29	5	25%
3.	30 – 39	8	40%
4.	≥ 40	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Dari tabel 5.1 dapat diketahui tingkat umur responden yang merupakan sampel penelitian ini yaitu berusia 21-29 tahun sebanyak 5 orang, kemudian 8 orang berusia 30 – 39 tahun dan 7 orang diatas 40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	12	60%
2.	Perempuan	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 atau 60% sampel berjenis kelamin laki-laki dan 8 atau 40% adalah perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan produktivitas pekerjaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bagus pola berfikirnya. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Tabel 5.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	≤ SLTA	6	30 %
2.	D3	4	20 %
3.	Sarjana (S1)	7	35 %
4.	Sarjana (S2)	3	15 %
Jumlah		20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Pada tabel diatas 5.3 diatas dapat diliat bawa dari 20 orang responden, terdapat sebanyak 6 orang responden (30%) berpendidikan SLTA atau dibawa

SLTA dan 4 orang responden (20%) berpendidikan D3, kemudian 7 responden (35%) berpendidikan sarjana (S1) dan 3 orang responden (15 %) berpendidikan pasca sarjana (S2). Dengan demikian pada umumnya jumlah responden dalam penelitian ini sebahagian besar adalah berpendidikan S1.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada. Dari sejumlah Tugas yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok salah satunya adalah pembinaan lembaga kemasyarakatan. Adapun upaya pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

a) Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan Tugasnya. Adapun indikatornya adalah :

- e. Membuat program penyuluhan.
- f. musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
- g. Melaksanakan program yang telah diatur.
- h. Mengevaluasi program dari hasil tersebut.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru :

Tabel 5.4 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator penyuluhan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Sub indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Membuat program penyuluhan	5 (25%)	8(40%)	7 (35%)	20(100%)
2	Melaksanakan program yang telah dibuat	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	20 (100%)
3	Mengevaluasi program	6 (30%)	9 (40%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		16 (26,66%)	30 (50%)	14 (23,33%)	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai membuat program penyuluhan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah paling dominan berada ada kategori Cukup Baik, yaitu sebanyak 8 responden (40%). Responden

lainnya menanggapi dengan kategori baik 6 responden (25%) dan kurang baik sebanyak 7 responden (35%).

Pada Sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai melaksanakan program penyuluhan yang telah dibuat pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menunjukkan 5 responden (25%) pada kategori baik, 13 responden (65%) pada kategori cukup baik dan 2 responden (10%) pada kategori kurang baik .

Pada Sub indikator ketiga diketahui bahwa jawaban respon mengenai mengevaluasi program penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru paling dominan berada ada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 9 responden (40%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori baik sebanyak 6 responden (30%) dan kategori Kurang baik sebanyak 6 responden (30%).

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai membuat penyuluhan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah paling dominan berada ada kategori Cukup baik, yaitu sebanyak 50%. Jika diuraikan setiap sub indikator didapat bahwa dalam sub indikator membuat program penyuluhan berada pada kategori cukup baik yaitu 40%. Kemudian pada sub indikator melaksanakan program yang telah dibuat berada pada kategori cukup baik yaitu 65%. Begitu

juga pada sub indikator mengevaluasi program dari hasil berada pada kategori cukup baik, yaitu 40%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Tangkerang Tengah mengenai Penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah pada kutipan wawancara berikut ini:

“Program penyuluhan itu sudah di buat dari awal periode saya yang akan digunakan untuk melaksanakan keseluruhan program-program pembinaan pada masyarakat. Program-program ini dibuat untuk keperluan masyarakat banyak, mulai dari kegiatan keamaan, kekeluargaan dan kegotong royong sesuai dengan lembaga masing-masing. Dan hal ini tidak saja dibuat dan dilaksanakan, bagian dari kantor lurha juga meninjau langsung program tersebut apakah sudah berjalan atau belum, jika sudah berjalan bagaimana perkembangannya, dan jika terkendala akan dicari tau hambatannya agar lembaga dapat berfungsi sebagai mana mestinya”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Lurah di Kelurahan Tangkerang Tengah telah membuat program penyuluhan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan program yang telah dibuat dan mengevaluasi jalannya program pada di Kelurahan Tangkerang Tengah.

Wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi penelitian ini dimana sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa peneliti menemukan rangkaian program untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan di kantor Kelurahan Tangkerang Tengah. Pada program tersebut dapat dilihat tujuan program, aktivitas program dan penanggung jawab program. Pada tujuan program pada umumnya adalah membantu lembaga lembaga kemasyarakatan dengan cara memberikan latihan atau pendidikan melalui penyuluhan. Penyuluhan ini juga memiliki aktivitas penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Peneliti juga menemui bahwa program ini diadakan dibawah tanggung jawab kelurahan, dimana kelurahan akan mengevaluasi program ini apakah sudah berjalan atau belum dengan cara langsung mengobservasi lapangan. Hal ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Pihak berwenang kelurahan yang bertugas mengawasi jalannya kelembagaan akan memastikan jalan atau tidaknya program penyuluhan yang telah diberikan.

b) Pengarahan

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.. Adapun indikatornya adalah memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan, dan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pengarahannya pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah:

Tabel 5.5 Pelaksanaan Pembinaan Pada Indikator Pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan	11 (55%)	9 (45%)	0	20(100%)
2	Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	15 (75%)	5 (25%)	0	20 (100%)
Jumlah		26 (65%)	14 (25%)	0	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dikategorikan kepada kategori baik, kategori cukup baik dan kategori kurang baik. Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa paling dominan berada ada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 11 responden (55%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori baik sebanyak 9 responden (45%).

Pada sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menunjukkan 15 responden (75%) pada kategori baik dan 5 responden (25%) berada pada kategori cukup baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai pelaksanaan pembinaan pada indikator pengarahan dalam pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru paling dominan berada ada kategori Baik, yaitu sebanyak 65%. Pada sub indikator memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan berada pada kategori baik yaitu 55%. Kemudian pada sub indikator mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan pada kategori baik yaitu 75%.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Tangkerang Tengah mengenai Penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam pengarahan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah pada kutipan wawancara berikut ini:

“Pengarahan sangat penting dalam suksesnya program ini. Kegiatan awal yang dilakukan setelah program itu dibuat adalah evaluasi pelaksanaannya, dari hasil evaluasi pada pembinaan tersebutlah nanti kami akan mengarahkan. Pemberiaan arahan ini dijadwalkan secara teratur dan juga dalam pemberian pengarahan ini akan dihadiri pihak masyarakat dan juga pihak lurah untuk berdiskusi mengenai masing-masing permasalahan kelembagaan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa lurah telah memberikan pengarahan pada pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah dengan waktu tertentu secara teratur dan pihak kelurahan

secara bersama –sama dengan lembaga dan masyarakat untuk membahas permasalahan dalam lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian ini diketahui bahwa program pembinaan ini benar dilaksanakan. Selain memberikn penyuluhan bagi kelambagaan, pihak kelurahan juga melakukan pengarahan. Pengarahan adalah langkah selanjutnya setelah penyuluhan. Dalam pengarahan pihak kelurahan akan melihat hasil penyuluhan yang telah diberikan dengan cara mengadakan rapat. Rapat yan diadakan adalah 1 kali dalam sebulan dengan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Dalam rapat ini akan dibahas evaluasi penyuluhan dan mengadakan pelaksanaan. Program pengarahan yang dilakukan diadakan secara teratur setiap bulannya dan mengundang dengan undangan resmi kepada setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.

c) Bimbingan

Lembaga Kemasyarakat kelurahan merupakan lembaga bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, serta menjadi mitra bagi lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkeseimbangan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta

mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan Tugasnya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- d. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- e. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- f. Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Tabel 5.6 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator Bimbingan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	20 (100%)
2	Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan	5 (25%)	14 (70%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	20 (100%)
Jumlah		18 (30%)	33 (55%)	9 (15%)	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis menunjukkan 10 responden (50%) pada kategori baik, dan

8 responden (40%) pada kategori cukup baik dan 2 responden (10%) pada kategori kurang baik.

Pada sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan paling dominan berada ada kategori baik, yaitu sebanyak 5 responden (25%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori cukup baik sebanyak 14 responden (70%) dan responden menanggapi dengan kategori kurang baik sebanyak 1 responden (5%).

Pada Sub indikator ketiga diketahui bahwa jawaban respon adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing dalam kegiatan menunjukkan 3 responden (15%) pada kategori baik, dan 11 responden (55%) pada kategori cukup baik dan 6 responden (30%) berada pada kategori kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai pelaksanaan pembinaan pada indikator bimbingan dalam pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru paling dominan berada ada kategori Cukup Baik, yaitu sebanyak 55%. Pada sub indikator kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis berada pada kategori cukup baik yaitu 40 %. Kemudian pada sub indikator peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan berada pada kategori cukup baik yaitu 70 %. Serta

pada sub indikator adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing berada pada indikator cukup baik, yaitu 55%.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Tangkerang Tengah mengenai bimbingan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam pengarahan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah pada kutipan wawancara berikut ini:

“Bimbingan pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah sangat kami perhatikan. Kegiatan bimbingan ini akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan menghadirkan pihak desa seperti Pak RT/RW. Kegiatan ini isinya ya membimbing masyarakat atau mengarahkan masyarakat jika terdapat kendala atau memiliki aspirasi untuk membangun desa dengan cara berdiskusi antar anggota”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah telah mendapatkan bimbingan dari kelurahan dengan cara berdiskusi dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut berisi tanya jawab antara masyarakat, RT dan RW serta anggota lembaga kemasyarakatan.

Hasil observasi penelitian mengenai bimbingan pada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah diketahui terdapat surat keluar dari pihak kelurahan untuk menghadiri rapat 1 bulan sekali dengan menghadirkan pihak desa seperti Pak RT/RW dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan program lembaga kemasyarakatan. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan benar mengadakan kegiatan pengarahan ini. Penulis juga menemukan surat kehadiran rapat setiap bulanya dalam rapat kelurahan dan juga dilengkapi dengan berita acara rapat oleh notulen yang menulis pertanyaan dan jawaban dalam rapat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan

Tangerang Tengah melakukan pengarahannya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangerang Tengah telah mendapatkan bimbingan.

2. Rekapitulasi Jawaban Responden dalam Kuesioner Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah rekapitulasi pelaksanaan Tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru yang terdiri dari dua bagian Tugas yaitu 1) penyuluhan, 2) Pengarahan, 3) Bimbingan.

Tabel V.7 Rekapitulasi Indikator Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru

No	Sub indikator	Frekuensi (orang)			Hasil
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Membuat program penyuluhan	5 (25%)	8(40%)	7 (35%)	Cukup Baik
2	Melaksanakan program yang telah dibuat	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	Cukup Baik
3	Mengevaluasi program dari hasil	6 (30%)	9 (40%)	5 (25%)	Cukup Baik
4	Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan	11 (55%)	9 (45%)	0	Baik
5	Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	15 (75%)	5 (25%)	0	Baik
6	Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	Baik
7	Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan	5 (25%)	14 (70%)	1 (5%)	Cukup Baik

8	Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	Cukup Baik
---	---	---------	----------	---------	------------

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil penelitian pada setiap indikatornya. Pada indikator penyuluhan kategori baik ada pada indikator membuat program penyuluhan dan kategori kurang baik pada indikator melaksanakan program yang telah dibuat, serta kategori cukup baik dalam mengevaluasi program dari hasil tersebut.

Pada indikator kedua kategori baik ada pada sub indikator memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan, dalam hal ini kelurahan memberikan materi arahan yang jelas dan terstruktur sehingga peserta memahami arahan yang diberikan. Kategori baik pada sub indikator mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.

Pada indikator ketiga, kategori cukup baik pada sub indikator peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dalam hal ini pelaksana tidak hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kelembagaan namun juga mencari *feedback* atau tanggapan dari anggota lainnya sehingga seluruh peserta kegiatan memahami apa yang telah disampaikan. Kategori kurang baik pada subindikator adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing.

2. Hambatan pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pencapaiannya dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor pendukung adalah hal-hal yang membantu perkembangan organisasi secara internal maupun eksternal. Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat perkembangan organisasi secara internal maupun eksternal.

1. Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas organisasi merupakan salah satu faktor internal yang penting dalam mengelola sumber daya yang sudah dimiliki organisasi agar organisasi mampu meraih kinerja yang baik. Ketika kapabilitas yang ada dalam organisasi baik, maka pengelolaan sumber daya akan menjadi baik, terutama ketika sumber daya yang dimiliki organisasi sudah baik dan kelak akan mampu meraih kinerja yang lebih baik. Kapabilitas perusahaan dipahami beberapa peneliti sebagai kemampuan organisasi dalam melakukan tugas atau aktivitasnya dengan terkoordinir demi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan lurah kelurahan Tangkerang Tengah mengemukakan bahwa:

“Dalam organisasi itu lingkungan kerja sangatlah penting. Kemudian dalam sebuah organisasi ada yang namanya lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal ini salah satunya kapabilitas organisasi. Penting adanya kapabilitas agar pegawai di setiap bagian kelurahan mampu bekerja dengan baik..”

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan informan mengenai lingkungan eksternal:

“Di kantor kita tidak terlalu terganggu dengan hal ini, kalau menurut saya hubungan antar pegawai harmonis, kebijakan barupun masih bisa ditolerir, hanya saja kekurangan SDM kadang juga membuat pegawai disini menjadi overload dalam bekerja, akhirnya kinerja tidak begitu maksimal.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Beberapa faktor faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Misalnya banyanya program, kurang bagusnya hubungan antar pegawai atau pegawai dengan atasan. Masalah keuangan organisasi atau juga masalah kebijakan baru. Hal-hal seperti ini akan menghambat kinerja pegawai.

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan salah satu problem yang lazim terjadi. Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama dan lain-lain.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti:

“ Kalau faktor eksternal itu keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Di kantor lurah Kleurahan Tangkerang Tengah yang paling menonjol adalah susunan dan pelaksanaan pergantian wewenang dalam bertugas. Terkadang pergantian kepala Badabagian dan juga kurangnya fasilitas dalam hal teknologi menjadi penghambat dalam melaksanakan pekerjaan” .

Berdasarkan wawancara diatas penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan baru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pknbaru dalam kategori cukup baik.
2. Terdapat faktor penghambat pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu faktor dari internal maupun eksternal.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat mengatasi hambatan internal yang berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota.
2. Mengatasi hambatan eksternal seperti memberikan pengarahan pada masyarakat agar lebih mengetahui fungsi pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta :
- Teras. Amin, Widjaja. 2000. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen, Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto, “Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”,
Jakarta, Kencana, 2014.
- Candis Paul, Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia, Penerjemah : Agus Dharma Jakarta: Penerbit Erlangga._2015.
- Hasibuan, Malayu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Aksara.
- Kencana, Inu, Syafiie. 2009. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
(SANRI)”, Cetakan Keempat, Jakarta : Bumi Aksara. Jakarta.
- Nanang Fattah, 2009.Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya.
- Nuraini, T.2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pekanbaru :
Yayasan Aini Syam.
- Masdar Helmi. 2000. Dakwah dalam Alam Pembangunan I. Semarang :
- Toha Putra Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintah Indonesia.
Jakarta :
- Djambatan. Syafiie, Kencana, Inu. 2007. Manajemen Pemerintahan. PT. Perca :
Jakarta. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.
2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Toha,
Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Usmain, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, “Metodologi Penelitian Sosial”,

Jakarta, Bumi Aksara, 2000.

Wijadja, HAW. Manajemen Organisasi. Rajawali Press, Jom FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 15 Jakarta, 1998. Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kelurahan Perat

Tjahja, 2000, Strategi pembangunan dan kemiskinan, Jakarta, Rineka Cipta.

Mansyur, Radjab, 2014 Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Jurusan ilmu pemerintahan FISIP

Yusri Munaf, 2016, Hukum administrasi Negara, Cetakan pertama, pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi :

Tim penyusun, 2014, 'Buku Pedoman Penulis, badan penerbit FISIPOL pekanbaru : UIR

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Tidak Mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no.18 tahun 2018 tentang Tugas Pokok RT/RW.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2018 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Data Monografi Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.